

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Oktober 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUB UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KHAIRUDDIN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **481076**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.596.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 839 m2/200 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 851.700.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/130 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 546.800.000
3. Tanah Seluas 650 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 97.500.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **469.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V RM3 2WD 2,4 RS A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX ABS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA ONTEL GAZELE Tahun 1940, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. LAINNYA, SEPEDA ONTEL RELIEGH Tahun 1940, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **101.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	151.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.317.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.317.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.